PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH (PSAP 07 ASET TETAP) DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung)

MUHAMMAD BAYU RIZQI

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The low quality of Application management asset in local government influences the quality of an government Bandung city financial report. Besides it also needs an accounting system for making financial reports. The phenomenon happens Bandung city get WDP opinion from BPK because some problems about aset and SAKD, so *the presentation of the financial statements is not timely in accordance with the applicable reporting period.*

This study aimed at finding out how much the [1]management asset local government affect the quality of Regional Financial Report and [2]Regional Financial Accounting System towards the quality of Regional Government Financial Report.

The method used in this study is descriptive and verification. The samples were BPKA of Bandung City Government with 72 people as respondents and the sampling technique was slovin. The data analysis technique used SEM PLS and software SmartLPS 3.0.M3 in addition.

The result showed that [1]management asset local government significantly affect positive towards the quality of Regional Government Financial Report and [2]Regional Financial Accounting System significantly affects positive towards the quality of Regional Financial Accounting Report on BPKA in Bandung City Government.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitasi laporan keuangan merupakan kriteria persayaratan laporan akuntansi keuangan yang di anggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Erlinai, 2013:25). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran Normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karaktersitik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami (Mahfud Solihin, 2015:15).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014. Status opini yang diberikan BPK ini merupakan penurunan dari kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya yang mendapatkan status wajar tanpa pengecualian. BPK meminta akuntabilitas dan transparansi harus terus ditingkatkan. Permasalahan tersebut merupakan gabungan antara ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan system pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan (Harry Azhar Azis : 2016).

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Doli D. Siregar, 2016:37), Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Doli D. Siregar, 2004:50)

Kondisi yang terjadi saat ini tidak selalu sesuai dengan teori, adapun fenomena yang terjadi di lapangan persoalan aset menjadi penyebab Pemkot Bandung mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar. Dia

mengakui, menangani aset menjadi persoalan yang cukup rumit untuk sesegera mungkin diselesaikan (Ridwan Kamil : 2016)

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. (Abdul Halim, 2014:83).

Fenomena yang terjadi mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu dimana banyaknya kegiatan fisik pencairan dana pada akhir tahun yang akan mengakibatkan penumpukan atas surat perintah membayar (SPM) Hal ini akan mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap SPM atas isi maupun dokumen pendukungnya yang seharusnya, walaupun di bantu oleh sistem seperti SIMDA, tetap saja sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. dan berakibat kepada besarnya laporan operasional (LO) namun kecilnya realisasi anggaran (Wulansari, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menulisakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Aset Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di BPKA.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di BPKA.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kualitas laporan keuangan yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada kualitas laporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu Pengelolaan Aset Daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2009: 146), Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun menurut Mahmudi (2009: 146), Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang

dikuasai pemerintah daerah, yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Baldric Siregar (2015:94), Mahfud Solihin (2015:158), dan PP No 71 Tahun 2010, kriteria agar aset tetap dapat diakui adalah:

1. Berwujud.
   Aktiva yang berwujud sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan kepada masyarakat umum.
2. Memiliki masa manfaat lebih dari setahun.
   Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
3. Harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
   Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan 15 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 16 dimaksudkan untuk dijual Dimensi Informasi dan Komunikasi.
4. Diperoleh atau di bangun dengan maksud di gunakan.
   Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum

1.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2014:43) Sistem Akuntansi Keungan Daerah merupakan Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Menurut Abdul Halim,dkk (2014:83) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
   1. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
   2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
   3. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikthisaran
   1. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi
   2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
   3. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur.
   4. Pembuatan ayat jurnal penutup
   5. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan
   6. Pembuatan ayat jurnal pembalik
3. Pelaporan.
   Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan

1.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan merupakan Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Menurut Mahfud Solihin (2015:15) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut menjadi prasyarat normatif yang diterapkan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemda terdiri atas::

1. Relevan.
   Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menurut informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya, yaitu
2. Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan
3. Dapat dibandingkan.
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal
4. Dapat dipahami.
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

1.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut M. Yusuf (2010: 56) menyatakan bahwa Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik. Sedangkan menurut Doli D. Siregar (2004 :50) menyatakan bahwa Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian asset yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Selanjutnya menurut Abdul Halim (2013) menyatakan pengelolaan aset juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi BPK dan juga menjadikan pemerintah daerah lebih memperhatikan pengelolaan aset daerah.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2004:35) Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki system akuntansi yang handal. Adapun menurut Bastian (2007:4) mengemukakan Jika sistem akuntansi keuangan daerah sudah berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri..

Selanjutnya menurut Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_a : Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2015:147), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) adalah Proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent

   Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

   Variabel independen pada penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Daerah (X_1)Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)
2. Variabel terikat atau dependent

   Menurut Sugiyono (2013:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Observasi

      Melakukan pengamatan secara langsung pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung untuk memperoleh data yang diperlukan.
   b. Wawancara (Interview)

      Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

      Adapun wawancara dilakukan terhadap Pegawai Sub Bagian Akuntansi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung
   c. Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Adapun kuesioner diberikan kepada Sub Bagian Akuntansi, Sekertariat, Anggaran, Pembendarahaan, Aset

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Penarikan Sampel

menurut Umi Narimawati (2010:38), Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian..

Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan *slovin*. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel 67 dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 80 pegawai BPKA.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kota Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Verifikatif

   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 3.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kulaitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur

digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif Pengelolaan Aset Daerah

Tanggapan responden mengenai Pengelolaan Aset Daerah dari 5 ndikator yang dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk 4 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengelolaan aset daerah, dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengelolaan Aset Daerah

No	Variabel	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Berwujud	Berwujud	515	1.005	51,33	KURANG
2		Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.	407	670	60,5	CUKUP
3		Perolehan aset tetap dapat diukur secara handal	188	335	47	KURANG
4		Diperoleh atau di bangun dengan maksud untuk digunakan	347	670	51,5	CUKUP
Total Akumulasi Pengelolaan Aset Daerah			**1465**	**2680**	**55**	**CUKUP**

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2017

Perhitungan: Skor Ideal = Nilai tertinggi × Jumlah Responden

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Pengelolaan Aset Daerah yang di ukur menggunakan empat indikator dan 8 item jumlah pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 55%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemerintah Kota Bandung masih tergolong Cukup, terdapat *gap* sebesar 45%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Pengelolaan Aset Daerah dan juga bila dilihat dari 4 indiktaor, tepatnya pada indikator perolehan aset tetap dapat diukur secara andal berada di bawah nilai rata-rata variabel.

4.1.3 Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Tanggapan responden mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari 3 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.23 sebagai berikut:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Pencatatan	Pecatatan	417	670	62,5	CUKUP
2		Pengikhtisaran	418	670	62	CUKUP
3		Pelaporan	174	335	52	CUKUP
Total Akumulasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			**1009**	**1675**	**60**	CUKUP

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2017

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang di ukur menggunakan 3 indikator dan 5 item jumlah pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 60%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandung masih tergolong cukup baik, terdapat *gap* sebesar 40%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indiktor Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 indikator. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.33 sebagai berikut :

Tabel 4.33
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Relevan	Relevan	224	335	73	BAIK
2		Andal	115	335	46	CUKUP
3		Dapat Dibandingkan	150	335	45	CUKUP
4		Dapat Dipahami	242	335	72	BAIK
Total Akumulasi Kualitas Laporan Keuangan			**791**	**1340**	**59**	**BAIK**

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2017
Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pernyataan $\times$ Nilai tertinggi $\times$ Jumlah Responden

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di ukur menggunakan empat indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 59%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemerintah Kota Bandung tergolong Cukup, terdapat *gap* sebesar 41%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.5 Hasil Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS V.3.0*, maka hasil analisis verifikatif Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Pengendalian Intern (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,603 dan termasuk dalam kategori hubungan yang bagus karena berada pada interval korelasi antara 0,601-0,80. Artinya Pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Nilai Koefisien determinasi (parsial) Pengelolaan Aset Daerah (X_1) memberikan pengaruh sebesar 59,3% terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sedangkan selisihnya sebesar 40,7% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

2.1.6 Hasil Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS V.3.0*, maka hasil analisis verifikatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,692 dan termasuk dalam kategori hubungan yang bagus berada pada interval korelasi antara 0,600-0,799. Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memberikan pengaruh sebesar 59,3% terhadap Kualitas Laporan Daerah (Y) Sedangkan selisihnya sebesar 40,7% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

2.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} Sistem Pengendalian Intern sebesar 4.784 lebih besar dari t_{kritis} (1,998). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 7.163 lebih besar dari t_{tabel} (1,998). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung.

4.1 Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,341 lebih besar dari t_{tabel} (1,998) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung

Fenomena mengenai Pengelolaan Aset Daerah yang terjadi di lapangan adalah bahwa persoalan aset menjadi penyebab Pemkot Bandung mendapatkan penilaian Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar. Dia mengakui, menangani aset menjadi persoalan yang cukup rumit untuk sesegera mungkin diselesaikan (Ridwan Kamil : 2016)

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikatro Berwujud persentase 51% dapat diinterpretasikan dalam kategori Kurang, dan terdapat *gap* sebesar 49%, dan terdapat persentasi terendah sebesar 48% pada butir pertanyaan tanah untuk fasilitas sosilal dan umum sudah sepenuhnya dikasai pemerintah daerah dan tidak ada yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh sebesar 32,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,603 yang berarti Pengelolaan Aset Daerah memberikan pengaruh yang bagus arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Arah hubungan positif Pengelolaan Aset Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukan bahwa Pengelolaan Aset Daerah yang semakin baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Pengelolaan Aset Daerah yang semakin baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010:56). Adapun menurut (Doli D. Siregar, 2004:50) mengatakan bahwa. Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut John Gamara Tangke, Halim, Gina Lucita (2015), mengenai Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makasar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Optimalisasi manajemen Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun sifat pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Rudianto Simamora, Abdul Halim (2013) menyatakan pengelolaan aset juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi BPK dan juga menjadikan pemerintah daerah lebih memperhatikan pengelolaan aset daerah

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yaitu harus di lakukan penelusuran aset seperti akta, sertifikat atau bukti bukti lain kepemilikan aset itu sendiri. Agar Pemerintah Kota Bandung dapat mengelola aset dengan semestinya agar dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan mendapat predikat WTP

4.1.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,163 lebih besar dari t_{kritis} (1,998) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Fenomena mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu dimana banyaknya kegiatan fisik pencairan dana pada akhir tahun yang akan mengakibatkan penumpukan atas surat perintah membayar (SPM) Hal ini akan mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap SPM atas isi maupun dokumen pendukungnya yang seharusnya, walaupun di bantu oleh sistem seperti SIMDA, tetap saja sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. dan berakibat kepada besarnya laporan operasional (LO) namun kecilnya realisasi anggaran (Wulansari, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh sebesar 36,65% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan

nilai korelasi sebesar 0,531 yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sedang/cukup arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Arah hubungan positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 36,65% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 73,45% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah yang Menurut Mardiasmo (2004:35) Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki system akuntansi yang handal. Adapun menurut Bastian (2007:4) mengemukakan Jika sistem akuntansi keuangan daerah sudah berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Selanjutnya menurut Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah dengan memberikan batas jatuh tempo dalam pengajuan SPM dan meningkatkan lagi kualitas tenaga kerja di bidang akuntansi yang akan membantu dalam pengelolaan SPM jika terjadi penumpukan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian itern berpengaruh cukup/sedang terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Masih lemahnya dalam mengelola aset daerah sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan opini WDP dari BPK
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sedang/cukup terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Lemahnya system akuntansi yang digunakan sehingga terjadi penumpukan SPM, dan saat terjadi penumpukan mengakibatkan kualtias pelaporan menjadi rendah dan sering terjadi kesalahan.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang masih belum optimal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yaitu harus di lakukan penelusuran aset seperti akta, sertifikat atau bukti bukti lain kepemilikan aset itu sendiri. Agar Pemerintah Kota Bandung dapat mengelola aset dengan semestinya agar dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan mendapat predikat WTP

2. Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang masih belum optimal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
   a. Dengan memberikan batas jatuh tempo dalam pengajuan SPM dan meningkatkan lagi kualitas tenaga kerja di bidang akuntansi yang akan membantu dalam pengelolaan SPM jika terjadi penumpukan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi.

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu Akuntansi Sektor Publik, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Pengelolaan Aset Daerah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi sektor publik.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.* Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia

Barker et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England

Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

BPKRI. 2016. "BPK Memberikan Opini Wajar Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *http://www.bpk.go.id/news/bpk-memberikan-opini-wajar-dengan-pengecualian-terhadap-laporan-keuangan-pemerintah-pusat.*

Dadang Suwanda. 2016. *Dasar – dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Danang Sunyoto.2013.*Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* JURNAL AKUNTANSI Vol. 02 No. 01 2015 ISSN 2339-1502

Daniel Kartika Adhi, Yohanes Suhardjo.2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang, Volume 5, NO 3, Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)

Dalibas 2015. *Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta

Deddi Nordiawan. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
D. Riant nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Dudi. Interview. 2016. "Mengapa Bandung masih mendapatkan opini WDP". Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.
Doli D. Siregar. 2016. *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*.Sinergi Manajemen Aset.
Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*, PT. Gramedia *Pustaka* Utama, Jakarta;
Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winylson Alexander 2015*. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung.* Jurnal EMBA 1 Vol.3 No.1. ISSN 2303-117.
Harahap, Sofyan Syafri, 2013, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
Hair J.F. et.al (1995), *"Multivariate Data Analysis With Reading*", Fourth Edition, Prentice Hall. New Jersey

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Ifa Ratifah, Muhammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan ISSN 2460-0784

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. Jakarta: Erlangga.

I Made Wirartha. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

I Putu Upabayu, I Wayan Putra. 2014. *Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 ISSN: 2302-8556

I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra 2015. *Faktor – factor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 ISSN: 2302-8556

John Gamara Tangke, Halim, Gina Lucita. 2015. *Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makasar.* Jurnal Administrasi Negara, volume 21 nomor 1

Kemendagri. 21015. "*Penerapan Sistem Akuntansi di Daearh Belum Optimal".* www.kemendagri.go.id

Koran Sindo Daerah. 2016. "Setahun, Pemkot 15 kali Digugat". *http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=174&date=2016-06-08*

Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Akuntansi

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mahmudi. 2011. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo (2004), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Mahfud Solihin, Dr Dwi Ratmono. 2015, *Akuntansi keuangan daerah berbasi akrual.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

M. Ramli Faud. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.

M. Yusuf. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik.* Jakarta : Selemba Empat.

Monika, Ventje, Sherly. 2015. *Analisi Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon.* Jurnal Emba. Vol. 3. No.1. ISSN 2303-1174

Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2 No: 1 Tahun 2014.

Noor, Juliansyah. (2011). *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Nur Indrianto dan bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Rahmadi Murwanto. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rukmi Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214.

Rudianto Simamora, Abdul Halim. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 13, Nomor 02. ISSN 1693-0908

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business : A Skill Building Aproach.* New York-USA : John Wiley and Sons, inc

Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subadriyah, Anita Rahayuningsih. 2015. Analisa Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *The 2nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189*

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2014 dari *World Wide Web*:http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pen gujian%20Model%20Riset.pdf

Urbach, Nils, Smolnik, Stefan &Riempp. Gerold. 2010. *A Methodological Examination of Empincal Research on Information System Success:* 2003 to 2007. *Proceedings of the Fourteenth AmericasConference on Information Systems.* Toronto. ON. Canada August 14th – 17th 2008.

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

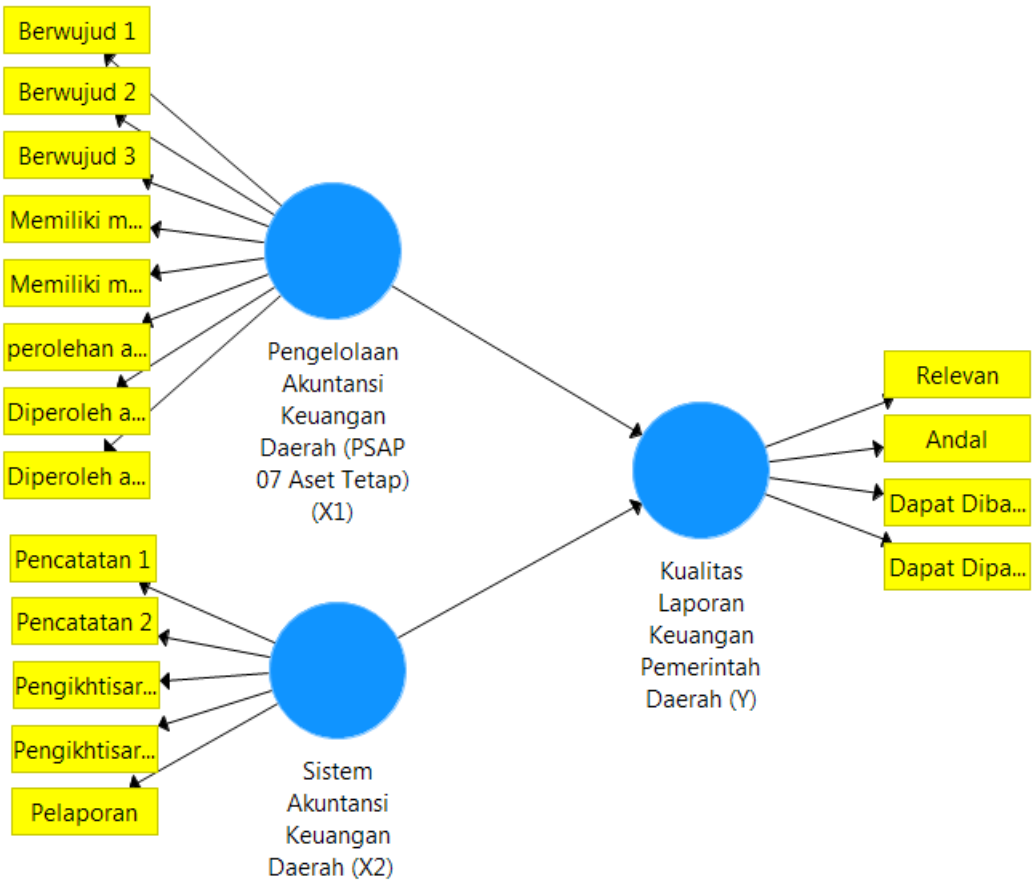
Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Wulansari. Interview. 2016. “Apakah ada masalah terkait system akuntansi yang di gunakan”. Jl. RE. Martanegara No. 4 Bandung

LAMPIRAN

Koefisien Jalur Struktural



Hasil Uji *t*

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_1>Y	0.373	4.784	*1.998*	H_{0} Ditolak	Signifikan
X_2>Y	0.535	7.163	*1.998*	H_{0} Ditolak	Signifikan

Nilai T hitung

